

Pandemi, Kelaparan, dan 'Elite Capture'

BERDASARKAN penelusuran Food and Agriculture Organization (FAO), pandemi Covid-19 memicu tingkat kemiskinan dan kelaparan banyak warga dunia. Organisasi pangan dan pertanian yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut mensinyalir, wabah ini ternyata memunculkan kasus-kasus kelaparan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Di negeri ini, bencana kelaparan mempunyai akar yang kuat. Sejak dahulu kala, rakyat terbiasa hidup lapar dan melalui hari-harinya dengan cukup berat. Celakanya, misi kolonialisme turut menggenapi penderitaan rakyat.

Catatan Historis

Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa melahirkan bencana kelaparan yang hebat. M Shaleh Putuhena (2007: 319) mencatat bahwa hasil sistem tanam paksa telah memberi keuntungan yang melimpah bagi Belanda sekaligus berhasil menutup defisit kerajaan. Di satu sisi, sistem tersebut genap menguntungkan pemerintah Belanda. Namun, di sisi lain, ia menghadirkan kesengsaraan bagi masyarakat Jawa. Kelaparan yang berlangsung antara tahun 1843 dan 1848 berimbas pada merosotnya jumlah penduduk secara drastis.

Berdasarkan catatan historis, awal tahun 1903 menandai terjadinya kelaparan di Indramayu. Setelah dua kali gagal panen, sejumlah kawasan di sana mengalami bencana kelaparan. Yang paling merasakan dampaknya yaitu penduduk tanah-tanah partikelir. Sayangnya, kepala pribumi enggan melaporkan kesengsaraan warganya. Saat diadakan konferensi para kepala pribumi dengan Residen, Asisten, dan Kontrolir, terlontar kritik tajam. Setiap kuwu (kepala desa) dinilai bertanggung jawab atas munculnya kesengsaraan di desanya. Para pemimpin lokal tersebut bakal dipecat apabila ada orang miskin di desa berkeluh kesah.

Setelah Indonesia terlepas dari belenggu

Riza Multazam Luthfy

penjajahan, bencana kelaparan masih saja ditemukan. Merujuk Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg (2007: 47-48), pada musim semi 1948 Ogburn berkeliling di desa-desa Jawa Tengah bersama Coert du Bois dan Presiden Soekarno. Ogburn terguncang saat melihat orang desa, mengenakan pakaian berbahan kulit kambing dan karung goni, berwajah kuyu akibat



KR-JOKO SANTOSO

menahan lapar.

Kesempatan Setara

Maraknya kelaparan di negeri ini menunjukkan ketidakhadiran negara dalam kehidupan warganya. Negara seakan abai terhadap nasib warganya yang selalu terombang-ambing oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Dicanangkannya pembangunan infrastruktur, program pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, serta kebijakan pemerintah lainnya yang semestinya bisa meringankan beban rakyat ternyata kurang membawa dampak signifikan. Apa yang dihasilkan cenderung menyusut seiring berhenti seketika bergantinya kebijakan.

Parahnya, kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam

mengangkat harkat dan martabat *wong cilik* justru terhambat perilaku elite lokal. Di kawasan perdesaan, kue kesejahteraan seringkali hanya dinikmati kelas sosial tertentu, sehingga menghapus peluang orang desa lainnya untuk memperbaiki taraf hidup. Ini berarti, sebagian orang kehilangan kesempatan yang setara untuk meraih distribusi kekayaan.

Di sinilah terjadi penyerobotan hak rakyat oleh pihak-pihak yang memiliki relasi dan kuasa. Berlakulah *elite capture*, yang dikenal sebagai sikap atau tindakan individu atau kelompok untuk memengaruhi lahirnya kebijakan. Pengambilan sikap atau tindakan ini bukan bermaksud mengutamakan kepentingan komunal, melainkan lebih bertujuan mendatangkan keuntungan pribadi. Padahal, konstitusi genap melindungi hajat hidup rakyat. Ketentuan bahwa setiap warga negara berhak meraih kesejahteraan lahir dan batin genap digariskan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Munculnya fenomena di atas menyebabkan para pemikir dan akademisi meragukan konsep negara kesejahteraan yang berkontribusi dalam perlindungan sekaligus pengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warga negara. Bahkan, tak sedikit dari mereka menganggapnya sebagai negara khayalan (utopia) belaka. □

*Riza Multazam Luthfy, peneliti desa. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-copy identitas. Terimakasih.